

# MONITORING



Indonesia for Global Justice

## FTA's HIGHLIGHT Edisi Juli, 2018



FTAs Highlight ini adalah monitoring IGJ yang dilakukan secara berkala setiap satu bulan, yang berisi mengenai sorotan singkat peristiwa-peristiwa yang terjadi disepanjang bulan mengenai kebijakan perdagangan internasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah, termasuk perkembangan putaran perundingan perjanjian perdagangan bebas dan isu mengenai perdagangan global

### **Mendag dan Menteri Ekonomi ASEAN Percepat Free Trade Agreement**

- Menteri Perdagangan (Mendag) RI Enggartiasto Lukita meminta negara-negara Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) mengedepankan fleksibilitas dalam perundingan guna mewujudkan Pakta Perdagangan Mega Free Trade Agreement (FTA), RCEP.
- Menurut Mendag, para Menteri RCEP sangat menyadari bahwa penyelesaian perundingan RCEP tahun ini sangat krusial. Hal ini mengingat situasi perdagangan global yang saat ini sedang menghadapi maraknya tindakan proteksionisme yang melahirkan tindakan perang dagang (trade war) dan dikhawatirkan akan berdampak trade diversion dimana terjadi pengalihan ekspor dari negara yang sedang perang dagang ke negara lain.

### **Negara Asia-Pasifik Mencari Kesepakatan Hadapi Kebijakan Trump**

- Para menteri dari 16 negara Asia-Pasifik mengatakan akan mengupayakan kesepakatan luas mengenai pembicaraan perdagangan bebas antara mereka pada akhir tahun ini dan membentuk sebuah front untuk menghadapi kebijakan proteksionis Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
- Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) membentuk Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) dengan enam negara mitra dagang yakni Jepang, Cina, Korsel, India, Australia, dan Selandia Baru.

- RCEP yang berupaya mengintegrasikan perdagangan bebas (free trade agreement/FTA)
- ASEAN dengan enam negara mitra dagangnya sepakat untuk menelurkan paket kesepakatan pada akhir tahun ini, karena melihat risiko serius dari proteksionisme perdagangan.
- Para perunding telah berusaha untuk mempersempit poin yang diperdebatkan dan menjembatani perbedaan di bidang-bidang seperti pengurangan tarif, perlindungan kekayaan intelektual dan e-commerce lintas negara.

## Fasilitas Ekspor

- Pemerintah memberi insentif untuk mendorong ekspor untuk meningkatkan kembali cadangan devisa yang makin tergerus akibat kerapuhan ekonomi dan guncangan eksternal maupun menggerakkan ekonomi.
- Selain menjamin ketersediaan bahan baku, pemerintah juga akan memberi intensif/subsidi industri untuk peningkatan ekspor *al* : industri makanan, furnitur dan karet yang berorientasi pasar mancanegara, khususnya bagi industri kecil dan menengah (IKM). Pemerintah juga mengidentifikasi masalah yang mengadang, baik soal perizinan, bahan baku, bea keluar, dan bea masuk.
- Dengan penduduk 265 juta dan dibandingkan dengan negara-negara tetangga ekspor RI hanya sekitar US\$ 168,73 miliar pada 2017. Ini bahkan tidak sampai separuh Singapura yang menembus US\$ 373,24 miliar, meski penduduknya hanya 5,6 juta atau 2% Indonesia. Ekspor Vietnam, Malaysia, dan Thailand juga makin meninggalkan kita, dengan masing-masing mencapai US\$ 160 miliar, US\$ 184 miliar, dan US\$ 231 miliar.
- Urgensi untuk meningkatkan ekspor ketika kurs rupiah kembali terpuruk setelah Amerika Serikat menaikkan suku bunga dan mengobarkan perang dagang dengan RRTRupiah pun tersungkur ke level sekitar Rp 14.358 per dolar AS kemarin, atau sudah terdepresiasi sekitar 6% sejak awal tahun ini.
- Cadangan devisa RI makin tergerus untuk ongkos operasi pasar Bank Indonesia. Bank Indonesia mencatat, cadangan devisa RI tinggal US\$ 119,8 miliar Juni lalu, terkuras US\$ 12,2 miliar dibanding awal tahun US\$ 132,0 miliar.
- Yang sudah di depan mata adalah ancaman Amerika Serikat untuk mengevaluasi produk-produk asal Indonesia yang selama ini mendapatkan fasilitas *Generalized System of Preferences* (GSP), atau tarif rendah karena negara berkembang.
- Ancaman ekspor lain datang dari Uni Eropa, soal ekspor minyak sawit yang dimajukannya tahun pembatasan minyak kelapa sawit sebagai bahan

dasar *biofuel* di UE, dari semula tahun 2030 menjadi 2021. Ini merevisi kebijakan pembatasan produk sawit yang sedianya akan dilakukan pada 2021, sementara produk minyak lainnya baru diberlakukan pada 2030.

- Pemerintah kita harus belajar dari Vietnam, Kamboja, dan Bangladesh yang kini menguasai pasar tekstil dan produk tekstil (TPT) Uni Eropa. Ketiga negara berkembang tersebut sudah meneken perjanjian *free trade agreement* (FTA) dengan UE, sehingga diberi pembebasan tarif bea masuk. Sedangkan Indonesia masih dikenakan tarif impor bea masuk produk TPT 12-30%.
- Kita butuh presiden yang maju langsung di depan memperjuangkan ekspor nasional secara konkret dengan setiap mitra dagang, termasuk menuntut persamaan atau resiprokal dengan RRT yang membuat kita defisit dagang US\$ 12,7 miliar. (\*)

### **PERSPEKTIF : Membangun Asa dari Jembatan Ekspor**

- Indonesia bersikukuh menjalankan diplomasi yang mendukung penguatan sistem multilateral WTO (World Trade Organization) dan tata aturan pendukungnya, termasuk pengaturan WTO-plus (FTA-CEPA-PTA).
- Indonesia juga terus melancarkan perundingan atas beberapa inisiatif free trade agreement (FTA) dan preferential trade agreement (PTA).

### **Pacu Pertumbuhan di Tengah Ancaman Proteksionisme**

- Tantangan berat Indonesia dalam beberapa tahun ke depan adalah memacu pertumbuhan ekonomi di tengah ancaman proteksionisme.
- Sejumlah produk impor dari RRT sudah dikenakan kenaikan bea masuk (BM) oleh AS. BM produk lain segera menyusul.
- Pada tahun 2017, defisit perdagangan AS dengan RRT sebesar US\$ 375,2 miliar dan pada lima bulan pertama 2018, defisit perdagangan dengan Tiongkok sudah mencapai Rp 152,2 miliar.
- Dampak langsung perang dagang AS-RRT terhadap Indonesia adalah membengkaknya impor berbagai jenis produk manufaktur dari RRT dan turunnya ekspor Indonesia ke AS.
- Trump sudah mengancam Indonesia untuk mencabut fasilitas keringanan BM, *generalized system of preferences* (GSP), kepada 124 produk Indonesia yang masuk ke negeri Paman Sam.
- Produk impor asal RRT dan defisit neraca perdagangan Indonesia terhadap negara berpenduduk 1,4 miliar itu terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2017, defisit perdagangan dengan Tiongkok sebesar US\$ 12,7 miliar dan

dalam empat bulan pertama 2018, defisit perdagangan dengan RRT sudah mencapai US\$ 7,4 miliar.

- Vietnam menjalin free trade agreement (FTA) dengan berbagai negara, termasuk dengan negara-negara Eropa dan AS. Dengan FTA, tekstil dan produk tekstil (TPT) Vietnam bisa dengan mudah menembus pasar Eropa.
- FTA diperlukan untuk melawan bahaya proteksionisme yang sudah dimulai AS.

### **Prakarsa baru AS di "Indo-Pasifik"**

- AS mengucurkan Dana 113 Juta Dollar AS terkait dengan pembangunan strategi "Indo Pasifik".
- Dalam bentuk penanaman modal (Investasi) baru kawasan di bidang teknologi 25 juta dolar dan energi dan hampir 50 juta dolar tahun ini untuk membantu negara memproduksi dan menyimpan sumber daya energi mereka serta menciptakan jejaring bantuan baru guna mendorong pengembangan prasarana.
- Sebagai respon kegagalan AS dalam "diplomasi" perselisihan dagang dengan China yang sudah memprakarsai Sabuk dan Jalan China yang menghubungkan Asia, bagian Afrika dan Eropa.
- Negara awal yang akan dikunjungi pekan ini Malaysia, Singapura dan Indonesia (4-5 Agustus 2018).
- "Indo-Pasifik" telah menjadi terkenal di kalangan diplomatik sebagai singkatan dari kawasan yang dipimpin lebih luas dan demokratis di "Asia-Pasifik", yang dari beberapa perspektif memiliki China otoriter, yang terlalu kuat di pusatnya.

#### **Agenda penting Bulan Juli :**

**A. Perundingan putaran kelima Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), 9-13 Juli di Brussels, Belgia 2018. Ikuti updatenya >>>**

<http://igj.or.id/laporan-kelompok-masyarakat-sipil-indonesia-dari-brussels-dalam-proses-intervensi-perundingan-ke-5-indonesia-eu-cepa-9-13-juli-2018-brussels-belgia/>

**B. Perundingan ASEAN-RCEP Ke-23, 20-24 Juli di Bangkok, Thailand.**

**Ikuti updatenya di >>>** <http://igj.or.id/igj-sampaikan-sejumlah-catatan-merah-dalam-perundingan-rcep/>

**\*Sekretariat IGJ\***

Komplek PLN, Jl.Laboratorium No.7, Duren Tiga, Pancoran,  
Jakarta Selatan 12760, Indonesia

**\*Kontak\***

Telp: +62 21 7984552

Email: [igj@igj.or.id](mailto:igj@igj.or.id)

Website: [www.igj.or.id](http://www.igj.or.id)